

## Analisis Partisipasi Politik Digital oleh Mahasiswa dalam Menyuarakan Aspirasi Kebijakan Publik

Triananingsih<sup>1</sup>, Naila Nurul Muksitun<sup>2</sup>, Andira Maretha Putri<sup>3</sup>, Intan Kusuma Dewi<sup>4</sup>,  
Bagas Huda Al Mansyur<sup>5</sup>, Joko Tri Nugraha<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar

<sup>1</sup>[triananingsih@students.untidar.ac.id](mailto:triananingsih@students.untidar.ac.id)\*, <sup>2</sup>[zelaaa310@students.untidar.ac.id](mailto:zelaaa310@students.untidar.ac.id),  
<sup>3</sup>[andiramarethaputri2007@students.untidar.ac.id](mailto:andiramarethaputri2007@students.untidar.ac.id), <sup>4</sup>[intankusumadewi@students.untidar.ac.id](mailto:intankusumadewi@students.untidar.ac.id),  
<sup>5</sup>[bagashuda@students.untidar.ac.id](mailto:bagashuda@students.untidar.ac.id), <sup>6</sup>[jokotrinugraha@untidar.ac.id](mailto:jokotrinugraha@untidar.ac.id),

\*corresponding author

---

### Article Info

#### Article History

Received:

05 May 2026

Accepted:

09 June 2026

Published:

10 June 2026

---

#### Kata Kunci

Partisipasi Politik  
Digital, Aspirasi  
Kebijakan Publik,  
Mahasiswa, Media  
Sosial, Demokrasi  
Digital

#### Keywords

Digital Political  
Participation, Public  
Policy Aspirations,  
Students, Social  
Media, Digital  
Democracy

---

### Abstrak

Partisipasi politik digital mahasiswa semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian aspirasi publik. Namun, efektivitas partisipasi tersebut masih menjadi perdebatan karena munculnya fenomena slacktivism dan terbatasnya bukti empiris mengenai kontribusinya terhadap proses kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi politik digital terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi kebijakan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Sampel penelitian terdiri atas 72 mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar yang dipilih melalui teknik simple random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner daring dengan skala Likert lima poin dan dianalisis melalui korelasi Pearson serta regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi kebijakan publik ( $r = 0,682$ ;  $p < 0,01$ ;  $R^2 = 0,465$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas politik digital, semakin besar kemampuan mereka dalam mengekspresikan dan menyebarkan aspirasi kebijakan. Hasil penelitian juga mendukung teori uses and gratifications, yang menjelaskan bahwa media sosial dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kognitif, integritas pribadi, dan interaksi sosial. Meskipun demikian, praktik slacktivism masih menjadi tantangan yang membatasi dampak nyata partisipasi digital. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian demokrasi digital di Indonesia serta memberikan implikasi bagi penguatan literasi politik kritis dan partisipasi mahasiswa yang lebih substantif dalam ruang digital.

*Abstract Digital political participation among students has grown significantly alongside the increasing use of social media as a platform for expressing public aspirations. However, its effectiveness remains contested due to the prevalence of slacktivism and the limited empirical evidence regarding its actual contribution to public policy processes. This study aims to examine the influence of digital political participation on students' ability to articulate public policy aspirations. A quantitative survey approach was employed involving 72 students from the Public Administration Study Program at Universitas Tidar, selected through simple random sampling. Data were collected using an online questionnaire based on a five-point Likert scale and analyzed through Pearson correlation and simple linear regression. The*

---

*findings reveal that digital political participation has a positive and significant effect on students' ability to voice public policy aspirations ( $r = 0.682$ ;  $p < 0.01$ ;  $R^2 = 0.465$ ). These results indicate that higher levels of engagement in digital political activities are associated with a greater capacity to express and disseminate policy-related aspirations. The findings also support the Uses and Gratifications Theory, suggesting that students utilize social media to fulfill cognitive, personal integrity, and social interaction needs. Nevertheless, slacktivism remains a challenge, as symbolic online actions often fail to translate into meaningful civic engagement. This study contributes to the growing literature on digital democracy in Indonesia and highlights the importance of strengthening critical political literacy and fostering more substantive forms of student participation in digital spaces.*

---

## **Pendahuluan**

Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan hak fundamental warga negara sehingga seringkali melibatkan masyarakat dalam siklus kebijakan publik. Keberlangsungan masyarakat demokratis dan terorganisir sangat bergantung pada pemahaman politik yang kuat. Diperlukan suatu partisipasi aktif dari para aktor sebagai penggerak kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan publik. Di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi semakin pesat, akibatnya partisipasi politik di Indonesia mengalami perubahan besar, terutama terjadi dalam ruang lingkup akademik. Mahasiswa sebagai bagian Generasi Z merupakan aktor akademik yang menjadi kelompok terdepan dan memiliki peran untuk melakukan inovasi digital dan transformasi budaya (Astuti & Hidayat, 2021). Generasi Z memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengekspresikan aspirasi terhadap isu-isu sosial (McKinsey & Company, 2024).

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024) mencatat bahwa 79,5 persen dari 221,5 juta pengguna internet didominasi oleh generasi muda, salah satunya generasi Z yang mencakup mahasiswa. Secara strategis, mahasiswa memiliki peran krusial dalam pergerakan kebijakan publik, seperti mengawasi kebijakan yang dibuat pemerintah dan menyuarakan kebijakan yang dianggap memberatkan banyak rakyat, serta memanfaatkan *platform digital* untuk menyuarakan aspirasi yang belum terdengar oleh para elite politik. Mahasiswa juga memiliki peran yang cukup aktif terhadap suatu informasi dan cenderung kritis terhadap berita, sehingga disebut sebagai penggerak partisipasi *digital* yang progresif karena dengan memanfaatkan media sosial banyak mahasiswa dapat mengakses, menyebarkan informasi, dan membentuk opini publik.

Meskipun terdapat banyak kelebihan dari media digital dalam memberikan ruang baru bagi aspirasi publik pada konteks kebijakan publik, namun terdapat kelemahan yang masih sering bersinggungan. Efektivitas partisipasi politik digital mahasiswa masih menjadi perdebatan karena sifatnya yang cenderung instan dibanding substantif. Adanya tantangan apatisme politik yang dialami generasi muda, komunikasi digital sering digunakan hanya menjadi instrumen tanpa kedalaman makna, posisi mahasiswa dipandang dapat meminimalisir apatisme politik karena adanya partisipasi politik digital yang progresif (Putricia et al., 2024). Banyak pengguna yang terjebak pada fenomena *slacktivism* dengan menunjukkan keterlibatan politik pada tindakan dasar seperti menyukai, membagikan ulang unggahan, atau mengisi petisi tanpa adanya tindakan nyata dalam pengawalan isu kebijakan. Bahkan terdapat indikasi mengenai tekanan publik digital seperti tagar #PeringatanDarurat yang mampu memengaruhi tahapan *agenda setting* kebijakan, namun seringkali gagal dalam tahap implementasi jangka panjang.

Fenomena tentang partisipasi politik di era digital telah dilakukan dengan beragam pendekatan dan fokus. Beberapa penelitian mencoba dalam mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhinya. (Muhammad Rizky, 2024) menemukan suatu fenomena terkait kampanye digital, terdapat partisipasi mahasiswa hanya 17,8% yang ikut berkontribusi dan sebagian faktor masih belum teridentifikasi. Selanjutnya, dibahas oleh (Almadhea et al., 2024) secara konseptual membahas partisipasi politik era digital, namun belum mampu membedakan antara partisipasi simbolik dengan partisipasi nyata. Sementara itu, (Judijanto et al., 2024) menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan media sosial dan pemahaman politik dengan partisipasi politik secara nyata.

Dari ketiga studi, terindikasi sebuah kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu terkait minimnya studi yang membahas secara spesifik hubungan antara partisipasi politik digital dengan aksi nyata, serta menganalisis kualitas individu dalam menyuarakan aspirasi. Partisipasi politik digital mahasiswa terutama dalam lingkup di Universitas Tidar masih terbatas, peneliti secara spesifik mengkaji partisipasi dalam konteks kebijakan publik di Indonesia melalui digital serta membedah pola komunikasi mahasiswa di tingkat lokal seperti di Universitas Tidar. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada mahasiswa Ilmu Administrasi Negara di Universitas Tidar sebagai representasi akademisi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola mahasiswa dalam mengakses, menyebarkan, dan

membentuk opini terkait kebijakan publik. Sekaligus dengan mengidentifikasi faktor penyebab mahasiswa seringkali terjebak fenomena *slacktivism*. Serta untuk menilai media sosial berfungsi sebagai instrumen tata kelola digital dengan menjembatani suara masyarakat agar benar-benar didengar oleh para pembuat kebijakan dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang dinamika partisipasi generasi muda dalam demokrasi digital Indonesia, serta sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik yang lebih substansial di ruang digital.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Partisipasi Politik Digital**

Partisipasi politik dapat diartikan secara harfiah sebagai peran serta kontribusi masyarakat dalam menentukan kebijakan yang dibutuhkan dengan menggunakan hak suara. Rush dan Althoff (sebagaimana dikutip oleh Bafadal et al., 2026) berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan proses yang melibatkan masyarakat dalam memengaruhi suatu perbuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pembuatan kebijakan yang dibutuhkan oleh kelompok kepentingan. Huntington dan Nelson memperluas pendapat tersebut dengan menekankan bahwa partisipasi politik merupakan tindakan warga negara yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di pemerintahan sesuai dengan beberapa kriteria yang dilakukan oleh masyarakat. Pemikiran tersebut diperkuat dengan ditemukan dalam media sosial telah menjadi ruang diskusi utama bagi generasi muda, meskipun dalam tantangan *echo chamber* (Achmad & Dwimawanti, 2024).

Teori partisipasi politik dalam era digital mengubah pola komunikasi antar warga negara dalam menyuarakan aspirasi mereka. Adanya keterlibatan politik masyarakat dapat memengaruhi keputusan politik untuk memberikan dampak positif (Budiardjo, 2007). Maka demikian, mahasiswa menjadi aktor penggerak dengan menggunakan media digital untuk diskusi di ruang publik. Namun, partisipasi tersebut terdapat tantangan yang harus dihadapi seperti fenomena *slacktivism* agar tidak menurunkan kualitas demokrasi. Partisipasi yang berkualitas dilihat dengan kedalaman deliberasi dan keberlanjutan aksi kolektif yang dihasilkan.

### **Teori *Uses and Gratifications***

Teori *uses and gratifications* merupakan teori yang dihasilkan oleh tiga ilmuwan yakni Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch yang memiliki kesamaan asumsi terhadap *audiens* dalam mengartikan apa yang mereka butuhkan secara fisik, batin, sosial, dan politik (Karunia H et al., 2021). Menurut Palmgreen, dalam pemenuhan kebutuhan, individu sebagai pengguna media memiliki cara dalam menilai serta memberi kepercayaan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan yang dihasilkan (Isnaini et al., 2023).

Dalam konteks aspirasi kebijakan publik, media digital digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi agar mendapatkan respon serta dukungan dari kelompok yang memiliki kebutuhan serupa. Mahasiswa sebagai aktor akademik berperan secara krusial dalam mendorong masyarakat untuk berdiskusi dalam ruang digital mengenai kebijakan yang tidak seimbang, serta mengawasi jalannya pemerintah. Selain itu, mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial untuk mengeksplorasi dan membahas kegunaan serta kepuasan dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah (Rachmi et al., 2024).

Penelitian mengenai partisipasi politik digital banyak memiliki faktor yang berbeda dari segi kekurangan maupun kelebihan. Penelitian yang diteliti (Muhammad Rizky, 2024) dengan menggunakan metode kuantitatif terhadap 103, terdapat kelemahan pada penelitian ini yaitu adanya ketidakmampuan dalam mengidentifikasi 82,2% faktor lainnya yang lebih dominan. Sebaliknya, (Almadhea et al., 2024) membahas mengenai partisipasi digital secara konseptual menggunakan 202 artikel sebagai referensi. Akan tetapi, terdapat bagian yang gagal dalam membedakan kinerja antara partisipasi simbolik seperti *like*, *share* dan sebagainya menjadi partisipasi nyata.

Hampir sama dengan penelitian sebelumnya, (Judijanto et al., 2024) menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari media sosial dan politik identitas, dalam penelusuran ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitiannya tidak menguji kaitan partisipasi digital dengan perilaku di dunia nyata sehingga menjadi kelemahan dasar dalam mengukur efektivitas politik digital. Ketiga penelitian tersebut minim terhadap penghubungan yang secara spesifik membahas antara partisipasi politik di dunia nyata dengan partisipasi politik digital.

Dalam penelitian ini kebutuhan mahasiswa terhadap informasi kebijakan dan ruang ekspresi mendorong terciptanya tindakan partisipasi politik digital yang nyata mulai dari mencari informasi hingga menandatangani petisi *daring*. Kepuasan dari interaksi digital memperkuat efikasi politik mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis penelitian yaitu tingkat partisipasi politik di ruang digital mahasiswa berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan intensitas penyampaian aspirasi terkait kebijakan publik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan yang untuk menganalisis pola komunikasi mahasiswa Universitas Tidar, terutama difokuskan pada angkatan 25 program studi Ilmu Administrasi Negara. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*. Populasi dalam penelitian berjumlah 245 orang. Dalam menentukan ukuran sampel, digunakan rumus slovin dengan *margin of error* 10% sehingga terdapat minimal sampel 72 responden. Pemilihan presentase ini didasarkan pada sebuah karakteristik populasi yang homogen.

Teknik sampling yang diterapkan yaitu simple random sampling, teknik ini memberikan peluang yang sama dan adil bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel dari seluruh angkatan 25 Ilmu Administrasi Negara. Dengan kriteria terhadap responden yaitu memiliki pola penggunaan media sosial seperti mengakses, menyampaikan maupun menyuarakan opini terkait kebijakan publik sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui kuisioner daring (*Google form*) dengan menggunakan *skala likert* 1-5, dengan indikator sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen (X) yaitu partisipasi politik digital, dan variabel dependen (Y) yaitu menyuarakan aspirasi kebijakan publik. Diikuti oleh beberapa indikator, pada variabel X meliputi literasi informasi politik, interaksi dan minat digital, dan atensi terhadap konten berita. Sedangkan, indikator variabel Y meliputi aktivisme digital, efikasi politik (keyakinan suara politik), serta keberanian beraspirasi. Instrumen dilakukan dengan menganalisis data secara statistik dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, uji korelasi, dan uji regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh

variabel X terhadap variabel Y. Setelah data terkumpul, akan dilakukan proses pengolahan data dibantu dengan menggunakan aplikasi lunak seperti SPSS dan Microsoft Excel.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian pada Tabel 1, responden mahasiswa Administrasi Negara didominasi oleh mahasiswa dengan usia muda, dari sisi jenis kelamin, banyaknya mahasiswa perempuan dibandingkan mahasiswa laki-laki. Hal ini, dipengaruhi oleh lingkungan mahasiswa, di mana banyak mahasiswa perempuan dan minoritas laki-laki lebih sering menggunakan media digital dengan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap informasi serta isu politik. Sesuai dengan teori *uses and gratifications*, kelompok ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap media sosial sebagai kebutuhan interaksi dan cara mengekspresikan aspirasi melalui media digital, hal ini menjelaskan angka partisipasi politik tinggi. Diperkuat dalam studi (Bramasta & Pierewan, 2023) yang menegaskan bahwa intensitas penggunaan ruang digital memengaruhi cara berpartisipasi politik. Berdasarkan domisili responden yang berasal dari Magelang lebih banyak dibanding dari luar Magelang, hasil ini menjadi salah satu karakteristik homogenitas yang memperkuat jawaban, tapi membatasi pandangan yang lebih luas. Sehingga hasil penelitian ini lebih mencerminkan mahasiswa dari program studi Administrasi Negara Universitas Tidar.

**Tabel 1. Data Karakteristik Responden**

Variables		N	%
Domisili	Magelang	56	77,8
	Luar Magelang	16	22,2
Age	17-19	62	86,1
	Others	10	13,9
Gender	F	59	81,9
	M	13	18,1
Total		72	100

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item instrumen penelitian memiliki nilai *corrected item – total correlation*. Signifikansi yang memenuhi syarat dan koefisien korelasi berada di nilai r tabel yang ditetapkan. Beberapa komponen memiliki nilai korelasi tinggi, seperti yang disajikan pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variables	Jumlah Pertanyaan	Rentang Corrected Item- Total Correlation	Nilai r tabel (N=72, a=0,05)	Keterangan
Partisipasi Politik Digital (X)	10	0,382-0,701	0,232	Valid
Aspirasi Kebijakan Publik (Y)	6	0,515-0,742	0,232	Valid
Jumlah (X +Y)	16	0,262-0,742	0,232	Semua Pertanyaan Valid

Berdasarkan Tabel 2, seluruh item dinyatakan valid. Instrumen penelitian akurat dalam mengukur fenomena partisipasi digital oleh mahasiswa. Fenomena tersebut berkaitan dengan tantangan *slacktivism* yang mengindikasikan antara validitas tinggi dengan mahasiswa yang paham membedakan *slacktivism* dalam menyuarakan aspirasi politik. Setelah seluruh item dinyatakan valid, dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi internal instrumen. Disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variables	Cronbach's Alpha	N Item	Keterangan
Partisipasi Politik Digital (X) dan Aspirasi Kebijakan Publik (Y)	0,837	16	Sangat variabel

Pada Tabel 3, instrumen penelitian dinyatakan sangat reliabel. Seluruh item pertanyaan memiliki konsistensi internal tinggi, dipastikan bahwa jawaban responden cenderung stabil. Uji reliabilitas menghasilkan Cronbach's Alpha yang tinggi sehingga dianggap sangat reliabel (Sugiyono, 2019), didukung oleh (Supriadi et al., 2024) bahwa dengan menggunakan media sosial dapat menjadi keterlibatan politik mahasiswa.

Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Tidar memiliki berbagai aktivitas dalam memanfaatkan media digital untuk kepentingan politik. Sebagian responden mengaku aktif mengakses informasi kebijakan publik melalui situs resmi pemerintah, media massa daring, *influencer* politik, serta video konyol maupun foto karikatur yang tersebar di *platform* media digital. Aksi ini biasanya dilakukan secara rutin, terlebih lagi apabila terdapat isu kebijakan

publik yang sedang hangat dibicarakan. Meskipun demikian, *algoritma* akses informasi tidak serta diikuti oleh keterlibatan yang lebih dalam.

Mahasiswa yang berkontribusi dalam kegiatan interaksi digital banyak yang memiliki sikap aktif. Hal ini, menjadi langkah awal dalam melakukan partisipasi politik dengan memanfaatkan media digital. Akan tetapi, sebagian besar kelompok memiliki rasa pesimis ketika berbicara tentang efikasi politik. Rasa ketidakpercayaan diri yang muncul saat menyampaikan aspirasi mereka di media sosial seperti di komentar situs pemerintah dan sebagainya, fenomena ini dipicu oleh pengalaman buruk dalam beraspirasi di media sosial yang tidak mengubah apapun bahkan tidak ada respon.

Sebagai aktor penggerak partisipasi politik, memiliki kemampuan dan pemahaman mengenai akses digital seperti literasi informasi politik, interaksi digital dan atensi terhadap berita politik. Kemampuan literasi menjadi dasar penting mahasiswa untuk tidak sekedar menerima informasi tapi mampu menyaring dan memahami politik sesuai dengan asumsi teori *uses and gratifications*. Kesiapan literasi informasi politik dapat mengukur kesiapan mahasiswa dalam kebijakan publik. Sama halnya, berdiskusi di ruang publik tentang kebijakan yang muncul dapat memberikan ruang baru bagi aspirasi publik, namun seringkali mahasiswa masih terjebak dalam tantangan *slacktivism*, sebagai tindakan simbolik. Walaupun demikian, adanya interaksi seperti berdiskusi di ruang publik dapat memberikan pengetahuan baru serta membawa masyarakat lebih mempertahankan hak mereka dalam menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan yang merugikan banyak kelompok.

Selanjutnya, minat mahasiswa terhadap berita menjadi salah satu penentu intensitas partisipasi politik digital. Perhatian besar yang tertulis pada berita terutama tentang keputusan kebijakan publik seringkali tidak seimbang hasilnya untuk masyarakat. Berita menjadi salah satu jembatan antara rakyat sipil dan mahasiswa dengan pembuat kebijakan publik di Indonesia. Tanpa adanya atensi terhadap berita, masyarakat sulit untuk mengetahui isu yang muncul. Meskipun di era digital, isu kebijakan dapat ditemukan diberbagai *platform*, namun tentu saja isu tersebut sebelumnya diangkat dari sebuah situs berita besar. Maka, apabila mahasiswa memiliki atensi lebih terhadap berita yang muncul dalam media digital akan sangat membantu mereka dalam mengetahui kondisi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Dalam penyampaian aspirasi, diikuti oleh sumber literasi utama digital. Hal ini, mencerminkan pada teori *uses and gratifications*. Partisipasi politik digital membuat terbentuknya rasa solidaritas dari berbagai kelompok karena merasakan dampak yang sama dari hasil sebuah kebijakan, meskipun dalam berpartisipasi hanya melalui tindakan simbolik. Lalu pada tingkat efikasi politik, terdapat keyakinan bahwa memberikan komentar di media sosial terhadap suatu kebijakan dapat memengaruhi hasil kebijakan (Wumbu et al., 2025). Tapi hasil kuesioner sebagian responden kontra dengan pernyataan tersebut. Hal ini, dipicu oleh respon pemerintah yang lambat terhadap penyampaian aspirasi secara daring. Banyak mahasiswa serta rakyat sipil yang membutuhkan kejelasan dari pemerintah, entah akan terjawab melalui konferensi pers atau pernyataan yang di umumkan dalam situs resmi. Dalam kenyataan, setelah mahasiswa maupun rakyat sipil lebih banyak menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan serta menyebarkan isu tersebut, baru pemerintah memberikan perhatian lebih. Sehingga muncul adanya slogan “*NoViralNoJustice*”. Secara keseluruhan, aspirasi kebijakan publik mahasiswa Administrasi Negara terbangun oleh adanya motivasi kognitif, sosial-afektif, dan efikasi politik.

Bagian ini membuktikan apakah benar hipotesis tentang partisipasi politik digital menjadi konsumsi media atau berkembang menjadi pendorong utama aspirasi kebijakan publik. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan partisipasi mahasiswa dalam ruang digital berkontribusi terhadap aspirasi kebijakan publik sesuai pada Tabel 5 dan pada koefisien regresi beserta tingkat signifikansi variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y, ditunjukkan pada Tabel 6.

**Tabel 4. Korelasi antara Partisipasi Digital dan Aspirasi Kebijakan**

Variables	Total X	Total Y	Keterangan
Total_X	1	0,682**	Korelasi positif kuat
Total_Y	0,682**	1	p<0,01

Maka demikian, H1 terbukti kebenarannya. Intensitas berpartisipasi politik digital tinggi, maka dalam menyuarakan aspirasi kebijakan publik semakin kuat. Secara substantif, nilai tersebut menggambarkan pengetahuan mahasiswa mengenai siklus kebijakan publik, disebut sebagai pola “linearitas tanggung jawab”. Mahasiswa menganggap media digital bukan hanya alat hiburan, tetapi sebagai ruang eksperimen kritik yang menguji efektivitas politik mereka. Korelasi tinggi mengkonfirmasi partisipasi digital dalam membangun

kepercayaan individu. Dengan berinteraksi aktif terhadap isu politik, mendorong kepercayaan bahwa suara mereka dapat memengaruhi agenda pemerintah.

Sudut pandang teori *uses and gratifications* diuraikan pada gratifikasi kognitif yang muncul ketika mahasiswa memanfaatkan aplikasi untuk mengakses informasi kebijakan yang lebih cepat dari media konvensional. Gratifikasi integritas pribadi terlihat dalam penguatan identitas sebagai agen perubahan, dilihat dari berbagai konten politik untuk mendapat pengakuan sosial dan kepuasan internal. Gratifikasi sosial tercipta melalui interaksi digital dalam membangun solidaritas, sehingga mahasiswa merasa didukung dalam menyuarakan aspirasi kebijakan pemerintah (Widayoko & Harianto, 2025).

**Tabel 5. Model Summary Regresi**

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std. Error of Estimte
1	0,682	0,465	0,457	0,281

**Tabel 6. Koefisien Regresi**

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standarized Coefficients Beta	t	Sig.
Constant	5,499	2,042		2,693	,009
Total Var X	,459	,059	,682	7,802	,000

Berdasarkan Tabel 5, banyak responden memiliki variasi terhadap aspirasi kebijakan publik, sisanya dipengaruhi faktor eksternal diluar penelitian, seperti iklim demokrasi dan regulasi UU ITE. Faktor eksternal seperti iklim demokrasi ini muncul karena kepuasan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah juga memberikan keterbukaan ruang dalam beraspirasi secara nyata sehingga menciptakan ruang aman dalam masyarakat. Kebijakan dari UU ITE, memiliki posisi yang positif, akan tetapi seringkali kebijakan ini disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila oknum dari pemerintah menyalahgunakan iklim demokrasi dan UU ITE, akan membuat kekhawatiran dari sisi masyarakat maupun hukum. Kekhawatiran yang muncul akibat rasa takut dalam menyuarakan aspirasi mereka dalam media digital yang akan dianggap menyebarkan kebohongan dan menyebarkan kebencian (UU, 2024). Ketidakpedulian pemerintah membuat mahasiswa lebih menggunakan proses “*NoViralNoJustice*”, diperkuat

dengan budaya politik kampus yang memotivasi mekanisme tersebut berdampak pada partisipasi politik digital.

Dibandingkan penelitian sebelumnya, penelitian ini menonjolkan orisinalitas dan relevansinya. Karena responden termasuk mahasiswa AN yang mempunyai kebijakan literasi lebih mendalam. Diperkuat dengan teori *uses and gratifications* untuk menunjukkan adanya tindakan politik nyata. Korelasi pada (Tabel 5) mendukung media sosial menjadi fondasi politik bagi mahasiswa Administrasi Negara. Sedangkan, pada penelitian (Judijanto et al., 2024) terdapat pernyataan mengenai dominasi politik identitas secara nasional bukan sebagai substansi kebijakan. Penelitian studi tersebut memberikan pengetahuan penting mengenai politik di era digital, serta bagaimana identitas sosial dapat memperkuat partisipasi politik digital. Namun, terdapat kelemahan yaitu terhadap dampak negatif seperti polarisasi ekstrem dan misinformasi yang disinggung secara umum. Penelitian dari (Muhammad Rizky, 2024) menunjukkan para pemilih muda di Semarang mencapai R Square 17,8% yang berarti keikutsertaan pada partisipasi digital relatif terbatas. Hasil tersebut disebabkan karena faktor yang belum dieksplorasi seperti pada pengaruh keluarga, pendidikan politik, dan kepercayaan terhadap kandidat serta pada penelitian ini terdapat R Square yang tinggi (Tabel 5.) sehingga hasil ini menunjukkan kebaruan serta perbedaan konteks responden penelitian.

Selain temuan utama, tantangan dari *slacktivism* merupakan tindakan keterlibatan politik yang dilakukan dengan tindakan simbolik seperti *like*, *repost*, maupun mengisi petisi *daring*. Fenomena ini sering dianggap sebagai makna negatif, namun apabila dilihat lebih luas, tindakan ini menjadi awal dari keterlibatan politik (Amalia et al., 2025). Fenomena dianggap terjadi karena dari hasil kuesioner yang belum tentu individu ikut berpartisipasi secara nyata, walaupun responden memilih ikut berpartisipasi. Dalam perspektif *uses and gratifications*, *slacktivism* muncul karena adanya keinginan pengakuan sosial yang lebih diutamakan dibandingkan dengan pemahaman isu publik. Adanya partisipasi digital bersifat menjadi spektrum dengan sebagian mahasiswa yang masih berada di tindakan simbolik dapat menuju ke tindakan substantif.

Penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi politik digital mahasiswa Administrasi Negara berkontribusi secara signifikan terhadap aspirasi kebijakan publik, demikian hipotesis yang diangkat terbukti kebenarannya. Semakin kuat partisipasi politik digital, semakin kuat aspirasi kebijakan yang disuarakan. Maka dari itu, media sosial dapat menjadi

ruang diskusi dalam berpartisipasi yang mengacu pada indikator dalam kuesioner, seperti aktivitas mencari informasi kebijakan publik melalui media sosial, mengkritisi unggahan politik, menandatangani petisi daring, serta menyuarakan opini di kolom komentar situs resmi pemerintah. Aktivitas ini menunjukkan bahwa mahasiswa berusaha memengaruhi wacana publik dengan berperan sebagai partisipan aktif di media sosial. Sejalan pada penelitian (Muhammad Rizky, 2024) yang mencatat rendahnya keterlibatan digital, namun dalam penelitian ini tingkat partisipasi mahasiswa tergolong tinggi terutama pada aspek literasi informasi dan interaksi digital. Dengan demikian, media sosial terbukti bukan sekedar tempat bertindak *slacktivism*, tetapi sebagai ruang diskusi yang substantif.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kebijakan publik. Keterlibatan aktif di ruang digital mendorong mahasiswa dalam membentuk opini serta menyuarakan kritik terhadap berbagai isu kebijakan. Temuan ini selaras dengan teori *uses and gratifications*, di mana mahasiswa berperan sebagai pengguna media aktif yang memenuhi kebutuhan kognitif, penguatan diri, dan interaksi sosial. Fenomena seperti *#NoViralNoJustice* juga memperlihatkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat tata kelola digital yang efektif untuk menarik perhatian pembuat kebijakan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, hasil ini belum dapat digeneralisasikan secara luas karena responden hanya berasal pada satu program studi dengan karakteristik yang relatif seragam. Kedua, model penelitian tergolong sederhana karena hanya melibatkan satu variabel independen, sementara partisipasi politik digital dipengaruhi oleh lebih banyak faktor lain. Ketiga, penggunaan kuesioner *self-report* berpotensi menimbulkan bias dalam pemahaman *slacktivism*.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan ruang lingkup dalam sampel penelitian ke berbagai program studi, menganalisis dampak regulasi UU ITE terhadap keberanian mahasiswa dalam beraspirasi di ruang publik, serta menerapkan studi longitudinal untuk memantau perubahan jawaban responden menjadi aksi kolektif yang nyata dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Achmad, F., & Dwimawanti, I. H. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5.
- Almadhea, Y. Z., Salahudin, S., & Firdaus, M. (2024). Political participation active in digital era studies: A systematic literature review (SLR). *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1). <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11299>
- Amalia, A. R., Aidah, S., Aqida, A., Pamulang, U., Barat, P., & Selatan, T. (2025). Slacktivism sebagai bentuk pendidikan politik: Studi kasus gerakan sosial online di Indonesia. *Kalacakra: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1), 72–86. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v6i1.9426>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Astuti, N., & Hidayat, D. (2021). Media sosial dan partisipasi politik Generasi Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 112–124.
- Bafadal, R. E., Jumaah, S. H., Samudra, M. D., & Dewi, B. (2026). Penguatan literasi dan kesadaran partisipasi politik mahasiswa perempuan sebagai warga negara demokratis. *Masyarakat Mandiri*, 3(1). <https://doi.org/10.62951/masyarakatmandiri.v3i1.2860>
- Bramasta, A. S., & Pierewan, A. C. (2023). Intensitas akses media digital dan partisipasi politik di Indonesia: Data WVS7 2018. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(2), 98–110. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i2.60992>
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Isnaini, M., Sofwan, M., & Habibi, A. (2023). Pendekatan uses and gratification theory pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar. *Journal on Education*, 5(4), 13647–13655. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2375>
- Judijanto, L., Wandan, H., Triyantoro, A., & Suroso. (2024). Pengaruh politik identitas dan penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik digital pemilih milenial dan Gen Z di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.58812/sish.v2i01.500>
- Karunia H, H., Ashri, N., & Irwansyah. (2021). Fenomena penggunaan media sosial: Studi pada teori uses and gratifications. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 92–104. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.187>
- McKinsey & Company. (2024). What is Gen Z? <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-gen-z>
- Muhammad Rizky. (2024). Efektivitas kampanye digital dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilihan kepala daerah Kota Semarang 2024. *Jurnal Audience*, 7, 182–200.
- Putricia, N. D., Febriyanti, A. I., Puteri, N. D., Syukriya, A. R., & Puspita, A. M. I. (2024). Studi literatur: Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik Gen Z (Zoomers). *Retorika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 74–82. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/1490>
- Rachmi, G., Aditya, A., & Putra, E. (2024). Motivasi pengguna media sosial di kalangan masyarakat digital. *Jurnal Nomosleca*, 10(2), 269–279. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v10i2.14603>

- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.
- Supriadi, Y., Gunawan, A., & Ahmadi, D. (2024). Pengaruh media sosial Instagram @PinterPolitik terhadap partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital*, 4(2), 135–140. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v4i2.4245>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Widayoko, G., & Harianto, S. D. (2025). Potret mad'u di ruang digital: Integrasi karakteristik audiens dan optimalisasi platform media sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 10(4), 306–312.
- Wumbu, Y. L. E., Putri, I. A., & Hendrik, D. (2025). Peran media sosial sebagai wadah partisipasi politik masa kini di kalangan Generasi Z (Studi kasus: Akun media sosial PUSPENPOL). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 521–526. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/6115>